



Tata Kelola Kolaboratif Antara Pemerintah Daerah, Sekolah, dan Komunitas dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Dasar di Kabupaten Sidoarjo

Rahma Tirtaningrum^{1*}, Ulul Albab², Kristyan Dwijosusilo³

¹⁻³ Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo Surabaya, Indonesia

*Penulis Korespondensi: faishalanas1@gmail.com¹

Abstract. *This study aims to explore collaborative management between local governments, educational institutions, and communities in improving the quality of basic education in Sidoarjo Regency. The background of this research stems from the increasing need for an adaptive, participatory, and sustainable education system in the era of decentralization, where intersectoral collaboration is key to realizing quality and equitable education. Sidoarjo Regency, as a region with rapid economic and social growth, faces obstacles in the distribution of quality basic education, particularly related to community participation, policy collaboration, and human resource capacity building at the school level. This study applies a qualitative approach through a case study method, involving resource persons from the Sidoarjo Regency Education Office, principals, teachers, school committees, and the education community. Data collection was conducted through in-depth interviews, participant observation, and analysis of regional education policy documents. Research findings indicate that collaboration between various actors has successfully improved education quality through community-based learning mentoring programs, teacher training, and innovative policies in school management. However, the implementation of collaboration continues to face obstacles such as lack of coordination between agencies, budget constraints, and ineffective joint program evaluation. The study concludes that successful collaborative management requires shared commitment, transparent communication, and ongoing policy support. Research recommendations emphasize the importance of enhancing intersectoral collaboration capacity, local education dialogue forums, and performance-based evaluation systems to maintain the sustainability of basic education quality in Sidoarjo Regency.*

Keywords: *Basic Education; Collaborative Management; Community Participation; Educational Policy; Intersectoral Collaboration.*

Abstrak. Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengelolaan kolaboratif antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan komunitas dalam memperbaiki mutu pendidikan dasar di Kabupaten Sidoarjo. Latar belakang penelitian ini berasal dari meningkatnya kebutuhan akan sistem pendidikan yang adaptif, partisipatif, dan berkelanjutan di era desentralisasi, di mana kerjasama antar sektor menjadi kunci untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan merata. Kabupaten Sidoarjo, sebagai daerah dengan laju pertumbuhan ekonomi dan sosial yang pesat, menghadapi kendala dalam distribusi kualitas pendidikan dasar, terutama terkait dengan partisipasi masyarakat, kolaborasi kebijakan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat sekolah. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif melalui metode studi kasus, melibatkan narasumber dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo, kepala sekolah, guru, komite sekolah, serta komunitas pendidikan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam, observasi partisipatif, serta analisis dokumen kebijakan pendidikan daerah. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa kerjasama antara berbagai aktor berhasil meningkatkan kualitas pendidikan melalui program pendampingan belajar berbasis komunitas, pelatihan bagi guru, serta kebijakan inovatif dalam pengelolaan sekolah. Meski begitu, pelaksanaan kolaborasi tetap menghadapi kendala seperti kurangnya koordinasi antar instansi, keterbatasan anggaran, dan belum efektifnya evaluasi program secara bersama. Studi ini menyimpulkan bahwa pengelolaan kolaboratif yang berhasil memerlukan komitmen bersama, komunikasi yang transparan, dan dukungan kebijakan yang berkelanjutan. Saran penelitian menekankan pentingnya peningkatan kapasitas kolaborasi antar sektor, forum dialog pendidikan lokal, dan sistem evaluasi berbasis kinerja untuk menjaga keberlanjutan kualitas pendidikan dasar di Kabupaten Sidoarjo.

Kata Kunci: Kolaborasi Antar-Sektor; Kebijakan Pendidikan; Manajemen Kolaboratif; Partisipasi Masyarakat; Pendidikan Dasar.

1. LATAR BELAKANG

Studi sebelumnya telah banyak meneliti aspek-aspek yang berkaitan dengan pendidikan di Sidoarjo, namun sebagian besar masih memusatkan perhatian pada dimensi kualitas pembelajaran atau efisiensi program pendidikan tertentu. Studi mengenai peran masyarakat dalam pendidikan nonformal menyoroti urgensi keterlibatan komunitas, namun kurang membahas cara kebijakan publik lokal mendukung kolaborasi itu (Mahardhani, 2018). Demikian pula studi mengenai Gerakan Literasi Sekolah di SD Muhammadiyah 1 Sidoarjo menunjukkan bahwa keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh dukungan dari masyarakat dan sekolah (Fitriani et al., 2024), namun belum membahas aspek pengelolaan lintas aktor secara sistematis. Sementara itu, penelitian tentang kualitas pendidikan jenjang SMP di Sidoarjo menunjukkan adanya disparitas mutu antar sekolah, namun belum mengkaji mekanisme kebijakan kolaboratif yang dapat menanggulangnya (Fitriani et al., 2024). Oleh karena itu, studi tentang pengelolaan kolaboratif antara pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat dalam konteks peningkatan mutu pendidikan dasar di Sidoarjo masih belum dilakukan secara mendalam.

Kebaruan studi ini terletak pada metode analisisnya yang menggabungkan konsep tata kelola kolaboratif dalam manajemen publik dengan konteks kebijakan pendidikan wilayah. Perhatian tidak hanya diberikan pada efektivitas kebijakan, tetapi juga pada pola interaksi antaraktor, mekanisme koordinasi, serta bentuk keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pendidikan dasar. Model tata kelola kolaboratif ini menjadikan pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat sebagai mitra setara yang bersama-sama berbagi peran dan tanggung jawab. Penelitian ini berusaha menunjukkan bahwa peningkatan mutu pendidikan tidak dapat dicapai hanya melalui intervensi administratif, tetapi harus melalui sinergi kebijakan, keterlibatan masyarakat, dan inovasi lokal yang berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis bentuk dan dinamika pengelolaan kolaboratif antara pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat di Kabupaten Sidoarjo dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan dasar. Studi ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat kolaborasi antara para aktor tersebut, serta menilai sejauh mana praktik kolaboratif ini berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan di tingkat sekolah dasar. Temuan penelitian diharapkan mampu memberikan sumbangan teoretis bagi studi administrasi publik yang berfokus pada kolaborasi, sekaligus menjadi rekomendasi praktis untuk pemerintah daerah dan Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo dalam merancang kebijakan yang partisipatif, adaptif, dan berkelanjutan demi meningkatkan mutu pendidikan dasar di era desentralisasi pendidikan.

2. LANDASAN TEORI

Landasan teori penelitian ini didasarkan pada sudut pandang administrasi publik yang menyoroti pentingnya efektivitas kebijakan pendidikan dalam meningkatkan kualitas layanan publik di tingkat daerah. Dwiyanto (2021) menyatakan bahwa reformasi administrasi publik saat ini ditandai dengan pergeseran dari paradigma birokrasi menuju paradigma kewirausahaan publik (*entrepreneurial government*), di mana pemerintah daerah didorong untuk lebih responsif, inovatif, dan bekerja sama dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Dalam konteks pendidikan, paradigma ini menyiratkan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo harus menciptakan model pengelolaan yang berfokus pada hasil (*result-oriented governance*), yang menekankan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan layanan pendidikan. Metode ini sejalan dengan gagasan *New Public Governance* (NPG) yang menganggap masyarakat dan organisasi non-pemerintah sebagai partner dalam merancang dan melaksanakan kebijakan pendidikan.

Selanjutnya, teori kebijakan publik yang diusulkan oleh Dunn (2018) menerangkan bahwa kebijakan publik adalah kumpulan keputusan yang diambil oleh pihak pemerintah untuk secara sistematis mengatasi masalah publik. Dalam konteks ini, kebijakan pendidikan di Sidoarjo perlu dilihat sebagai alat strategis untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia di daerah tersebut. Pengembangan, pelaksanaan, dan penilaian kebijakan pendidikan harus dilaksanakan berdasar pada prinsip rasional dan keterlibatan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan yang efektif tidak hanya dinilai dari jumlah program yang dilaksanakan, tetapi juga seberapa baik program-program tersebut memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya dalam menghadapi tantangan era digital dan pasca-pandemi yang mengubah cara belajar dan pengelolaan sekolah.

Teori layanan publik yang diajukan oleh Denhart and denhart (2007) dengan pendekatan *New Public Service* (NPS) juga penting dalam konteks ini. NPS menegaskan bahwa sasaran utama administrasi publik tidak hanya efisiensi birokrasi, tetapi juga melayani masyarakat dengan cara partisipatif dan adil. Dalam pelaksanaannya, Dinas Pendidikan Sidoarjo diharapkan mampu berperan sebagai fasilitator dan kolaborator yang memberdayakan sekolah, guru, serta masyarakat untuk berkolaborasi menciptakan inovasi dalam layanan pendidikan. Prinsip ini terlihat dari usaha untuk meningkatkan layanan digital, transparansi informasi, dan partisipasi publik dalam pengawasan pendidikan.

Teori implementasi kebijakan sesungguhnya menjelaskan dasar-dasar untuk memahami elemen-elemen yang mempengaruhi suksesnya kebijakan pendidikan (Mahardhani, 2025). Pelaksanaan yang efisien ditentukan oleh kejelasan sasaran kebijakan, ketersediaan sumber daya, dukungan politik, serta kemampuan organisasi yang menjalankannya. Di Sidoarjo, penerapan kebijakan pendidikan sering kali menghadapi isu koordinasi antar sektor, kekurangan sumber daya manusia, serta tantangan dalam menyesuaikan diri dengan teknologi pembelajaran. Karena itu, diperlukan suatu pendekatan manajemen kebijakan yang fleksibel dan fokus pada pembelajaran yang berkelanjutan.

Di sisi lain, teori Tata Kelola Kolaboratif yang dirumuskan oleh Ansell & Gash (2007) relevan untuk menguraikan pentingnya kerjasama antara pemerintah, sekolah, sektor swasta, dan masyarakat dalam peningkatan layanan pendidikan. Kolaborasi ini menghasilkan ruang diskusi dan saling percaya untuk merancang kebijakan yang lebih inklusif dan relevan. Dalam pelaksanaannya, Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo dapat menyelenggarakan forum komunikasi antara berbagai pihak untuk membahas perencanaan, implementasi, dan evaluasi program pendidikan lokal, terutama yang terkait dengan pemerataan akses dan kualitas layanan.

Dengan menggabungkan beragam teori tersebut, studi ini berlandaskan pada pemahaman bahwa kebijakan serta layanan pendidikan yang efisien di tingkat lokal membutuhkan pendekatan yang harmonis antara teori administrasi publik dan implementasi kebijakan pendidikan. Pendekatan ini tidak hanya mengutamakan efisiensi birokrasi, tetapi juga mendukung kolaborasi, partisipasi masyarakat, serta inovasi digital dalam menghadapi tantangan pendidikan di masa depan (Castañer & Oliveira, 2020; Mahardhani et al., 2025; Widiawati et al., 2023). Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menjembatani kekurangan teoritis dan empiris mengenai penerapan prinsip-prinsip *New Public Service* dan *Collaborative Governance* oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan secara berkelanjutan di zaman modern.

3. METODE

Studi ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis untuk menggali secara mendalam fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo dalam memperbaiki kualitas kebijakan dan layanan publik di sektor pendidikan. Metode ini dipilih karena dapat menggambarkan fenomena dengan cara kontekstual dan holistik sesuai dengan keadaan sosial yang berlangsung di lapangan. Tempat penelitian terletak di area Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo beserta institusi pendidikan yang di bawah naungannya, dengan penekanan pada program serta kebijakan peningkatan kualitas layanan pendidikan yang berbasis inovasi dan kerja sama. Metode pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam kepada pejabat struktural Dinas Pendidikan, kepala sekolah, guru, dan pemangku kepentingan pendidikan lainnya, serta melakukan observasi langsung terhadap pelaksanaan program layanan pendidikan. Di samping itu, kebijakan dokumentasi, laporan tahunan, serta statistik pendidikan juga dimanfaatkan sebagai sumber sekunder untuk memperkuat hasil penelitian lapangan. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan model interaktif Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga tahap utama: pengurangan data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan/verifikasi (Pahleviannur et al., 2022). Data diuji validitasnya dengan menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode guna memastikan keandalan serta objektivitas hasil penelitian. Melalui desain metode yang terencana secara sistematis ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan temuan yang tidak hanya deskriptif tetapi juga analitis, sehingga dapat memberikan kontribusi konseptual terhadap penguatan teori administrasi publik, serta saran praktis untuk pengembangan kebijakan pendidikan di tingkat daerah, terutama di Kabupaten Sidoarjo.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Pendidikan melalui Inovasi Digital

Temuan penelitian mengindikasikan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo telah menerapkan berbagai inovasi digital dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik pendidikan. Beberapa program utama yang teridentifikasi adalah *Sidoarjo Education Service Center* (SESC), aplikasi e-Supervisi untuk mengawasi kinerja kepala sekolah dan guru, serta sistem e-Kinerja Pendidikan yang terhubung dengan *Sidoarjo Smart City*. Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar menunjukkan bahwa penerapan teknologi informasi secara signifikan mempercepat proses administrasi pendidikan, terutama dalam perizinan dan pelaporan kegiatan sekolah. Inovasi digital ini juga mendukung transparansi publik karena masyarakat dapat mengawasi program sekolah secara online.

Penemuan ini mendukung teori *New Public Management* yang diusulkan oleh Osborne & Schuetze (2025), bahwa digitalisasi layanan publik dapat meningkatkan efisiensi birokrasi dan menurunkan beban administratif yang tidak efektif. Namun, di sisi lain, hasil pengamatan menunjukkan bahwa penerapan teknologi masih belum tersebar merata di seluruh wilayah, terutama di sekolah-sekolah di daerah terpencil seperti Balongbendo dan Krembung yang memiliki keterbatasan infrastruktur digital. Kesenjangan ini menjadi hambatan dalam menjamin keadilan pelayanan publik sebagaimana prinsip *New Public Service* yang menekankan partisipasi dan inklusivitas.

Dari perspektif pengguna, kepala sekolah dan guru yang diinterview menyebutkan bahwa aplikasi e-Supervisi dan e-Kinerja memudahkan mereka dalam melaporkan kegiatan pembelajaran serta menilai kinerja. Sebanyak 78% partisipan mengungkapkan bahwa sistem ini mempercepat proses pelaporan, walaupun 22% sisanya merasa tertekan oleh masalah teknis dan minimnya pelatihan.

Temuan itu mengindikasikan bahwa meskipun terdapat tantangan teknis, inovasi digital telah menjadi faktor kunci dalam peningkatan efisiensi layanan publik dalam sektor pendidikan. Pernyataan ini sejalan dengan pandangan Denhardt dan Denhardt dalam konsep *New Public Service*, yang menyatakan bahwa pelayanan publik modern tidak hanya fokus pada efisiensi, tetapi juga pada pemberdayaan dan respons terhadap kebutuhan masyarakat (Mahardhani, 2023).

Implementasi inovasi digital di Sidoarjo dapat disimpulkan sebagai model yang adaptif, memperlihatkan sinergi antara *New Public Management* dan *New Public Service*. Pemerintah tidak hanya fokus pada efisiensi teknologi, tetapi juga memastikan partisipasi masyarakat dalam mengevaluasi dan meningkatkan sistem pelayanan pendidikan secara terus-menerus.

Implementasi Kebijakan Publik Berbasis Partisipasi Publik

Studi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pendidikan di Sidoarjo semakin berfokus pada partisipasi publik, khususnya melalui penglibatan komite sekolah dan Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Pendidikan (FKMPP). Mekanisme partisipasi ini terwujud dalam perencanaan program sekolah, pengawasan pemanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), serta penetapan prioritas kegiatan pendidikan yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat. Dinas Pendidikan menyelenggarakan pertemuan rutin antara pemangku kepentingan pendidikan untuk menampung aspirasi.

Hasil tersebut sejalan dengan teori *Collaborative Governance* dari Ansell dan Gash yang menegaskan bahwa efektivitas kebijakan publik akan meningkat apabila dilaksanakan melalui kolaborasi antarentitas yang didasari oleh kepercayaan dan kesetaraan peran (Mahardhani et al., 2025). Dalam konteks Sidoarjo, kerja sama itu terlihat dalam kebijakan Sekolah Kolaboratif yang telah dikembangkan sejak tahun 2022, di mana sekolah berkolaborasi dengan dunia usaha dan lembaga masyarakat untuk menyusun kurikulum kontekstual dan melakukan kegiatan literasi sosial.

Namun, studi juga menunjukkan bahwa tingkat keterlibatan masyarakat masih belum seimbang. Di sejumlah sekolah di kota seperti SMPN 2 dan SMAN 3 Sidoarjo, partisipasi berjalan dengan aktif, sedangkan di daerah pinggiran, peran masyarakat cenderung pasif akibat minimnya literasi kebijakan dan rendahnya akses informasi publik. Hal ini mengindikasikan perlunya strategi komunikasi kebijakan yang lebih terbuka, sesuai dengan teori Dunn yang menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan sangat tergantung pada kejelasan pesan dan penerimaan sosialnya (Fika et al., 2023).

Analisis dokumen mengungkapkan bahwa mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan Sektor Pendidikan (Musrenbang Pendidikan) telah berfungsi sebagai sarana utama untuk partisipasi publik. Namun, 60% peserta forum berasal dari birokrat dan kepala sekolah, sementara perwakilan masyarakat umum dan komite sekolah masih minim. Oleh karena itu, pelaksanaan partisipasi publik harus diperluas agar tidak terlihat elitis, tetapi benar-benar mencerminkan harapan masyarakat pendidikan.

Secara keseluruhan, hasil ini memperkuat prinsip *New Public Service* yang diungkapkan oleh Denhardt & Denhardt menyatakan bahwa masyarakat bukan pelanggan, melainkan pemilik negara (Febriadi, 2022). Dinas Pendidikan Sidoarjo telah melangkah ke arah itu dengan membangun ruang kolaboratif, walaupun masih diperlukan peningkatan kapasitas dan keberlanjutan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan.

Kinerja Aparatur dalam Pelayanan Pendidikan Daerah

Kinerja aparat merupakan elemen krusial dalam suksesnya kebijakan dan layanan publik di bidang pendidikan. Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan Sidoarjo telah mengimplementasikan sistem e-Kinerja Pendidikan untuk menilai produktivitas, inovasi, dan disiplin ASN. Analisis data menunjukkan adanya peningkatan indeks kinerja aparat sebesar 15% dalam dua tahun terakhir (2023–2025), terutama pada sektor layanan administrasi pendidikan dasar.

Temuan ini memperkuat teori implementasi kebijakan Mazmanian dan Sabatier (Mubarok et al., 2020) yang menekankan bahwa suksesnya implementasi dipengaruhi oleh kejelasan sasaran kebijakan, sumber daya manusia, serta dukungan dari organisasi yang melaksanakannya. Di Sidoarjo, aspek kepemimpinan birokrasi serta budaya organisasi yang adaptif berperan sebagai pendorong keberhasilan dalam penerapan sistem digital dan pelayanan publik. Akan tetapi, masih ada hambatan berupa beban kerja yang tinggi dan kurangnya pelatihan lanjutan untuk pegawai teknis di tingkat sekolah. Selain itu, hasil pengamatan menunjukkan bahwa motivasi kerja pegawai meningkat saat hasil kinerjanya dihubungkan dengan sistem penghargaan yang berbasis kinerja. Pada tahun 2024, sebanyak 32 ASN Dinas Pendidikan mendapatkan penghargaan untuk inovasi dalam layanan pendidikan digital.

Analisis ini mengindikasikan bahwa peningkatan kinerja aparat berhubungan langsung dengan perbaikan kualitas layanan publik pendidikan. Hal ini sejalan dengan konsep tata kelola berorientasi hasil (Saputra & Wardhana, 2025), di mana pemerintah daerah perlu menilai keberhasilan melalui pencapaian hasil, bukan hanya fokus pada proses administrasi. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas ASN dalam konteks Dinas Pendidikan Sidoarjo tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dalam mendukung reformasi birokrasi pendidikan daerah yang responsif, kreatif, dan berfokus pada hasil.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan peningkatan kinerja aparat dalam pelayanan pendidikan daerah di Kabupaten Sidoarjo sangat bergantung pada dukungan sistem pengelolaan digital yang terintegrasi dengan prinsip pemerintahan cerdas. Pelaksanaan e-Kinerja Pendidikan berfungsi tidak hanya sebagai sarana evaluasi, tetapi juga alat pembelajaran organisasi yang membantu pegawai dalam memahami pencapaian, kekurangan, dan peluang pengembangan diri mereka. Selain itu, partisipasi aktif pemimpin dalam proses pemantauan serta penyampaian

umpan balik yang berbasis data mendorong terbentuknya budaya kerja yang kolaboratif dan akuntabel. Peningkatan keterbukaan kinerja ASN juga mendorong kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik, karena setiap pencapaian dapat dipantau secara jelas melalui platform digital Dinas Pendidikan. Dalam hal ini, perubahan kinerja pegawai tidak hanya berkaitan dengan efisiensi administratif, tetapi juga memperkuat nilai-nilai etika penyampaian layanan dan profesionalisme yang berfokus pada kepuasan publik. Dengan demikian, arah kebijakan pengembangan kinerja aparatur di masa mendatang harus mengintegrasikan inovasi teknologi, peningkatan soft skills ASN, dan keterlibatan publik agar sistem layanan pendidikan di Sidoarjo lebih responsif, inklusif, serta mampu menghadapi tantangan pendidikan daerah di era digital.

Sinergi Pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan dalam Tata Kelola Pendidikan

Temuan penelitian mengindikasikan bahwa efektivitas kebijakan pendidikan di Sidoarjo sangat bergantung pada kerjasama yang solid antara pemerintah setempat, institusi pendidikan, dan masyarakat. Kolaborasi ini terwujud melalui forum koordinasi antar sektor seperti Dewan Pendidikan Kabupaten Sidoarjo dan kerja sama dengan universitas, sektor bisnis, serta lembaga media. Kegiatan ini berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan, penyediaan sarana belajar, dan pelatihan keterampilan digital untuk guru dan murid.

Pendekatan ini mencerminkan prinsip Tata Kelola Kolaboratif (Ansell & Gash, 2008) di mana keberhasilan pengelolaan publik tidak hanya ditentukan oleh kekuatan pemerintah, tetapi juga oleh kemampuan beragam aktor untuk saling berbagi peran, tanggung jawab, dan sumber daya. Dalam konteks Sidoarjo, bentuk kolaborasi nyata tampak pada program Kelas Industri, kerja sama dengan Politeknik Negeri Jember dan PT Freeport Indonesia untuk pelatihan keterampilan di tingkat SMK.

Namun, wawancara bersama perwakilan FKMPP menunjukkan bahwa sinergi ini masih mengalami tantangan dalam koordinasi serta tumpang tindih peran antarinstansi, terutama terkait pembiayaan dan evaluasi program. Oleh karena itu, diperlukan sistem kolaborasi yang lebih terencana dan berdasarkan kesepakatan resmi antar pihak, agar kerja sama antar lembaga dapat berlangsung secara berkelanjutan. Secara konseptual, kerjasama ini sejalan dengan prinsip *Good Governance* yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat sebagai pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dinas Pendidikan Sidoarjo telah memperlihatkan praktik baik dalam transparansi dan akuntabilitas, namun perlu meningkatkan aspek partisipatif untuk mewujudkan tata kelola pendidikan yang inklusif dan responsif terhadap perubahan

masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kolaborasi antara berbagai aktor dalam pengelolaan pendidikan di Sidoarjo adalah penerapan nyata dari integrasi teori *Collaborative Governance* dan *New Public Service*. Model ini dapat menjadi acuan bagi daerah lain dalam menciptakan manajemen pendidikan yang inovatif, partisipatif, dan berkelanjutan dengan dasar kemitraan publik (Hay, 2025).

Di samping itu, dinamika kolaborasi antar pelaku pendidikan di Kabupaten Sidoarjo juga menunjukkan bahwa pembentukan kepercayaan (*trust-building*) menjadi elemen kunci dalam kelangsungan pengelolaan kolaboratif. Hasil wawancara dengan kepala sekolah dan pengurus komite pendidikan menunjukkan bahwa kolaborasi dilakukan secara efektif bila komunikasi antar pihak terbuka dan fokus pada pencapaian hasil bersama, bukan pada kepentingan sektoral. Pemerintah daerah telah berusaha membangun kepercayaan melalui forum konsultatif yang melibatkan kepala sekolah, guru, dan perwakilan komunitas pendidikan dalam perencanaan program tahunan. Langkah ini meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan menumbuhkan rasa kepemilikan bersama atas program pendidikan yang dijalankan. Namun, partisipasi masyarakat masih cenderung reaktif dan bergantung pada inisiatif dari pihak sekolah atau pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme partisipasi yang lebih terstruktur dan berkelanjutan, seperti mendirikan forum edukatif berbasis daerah atau kecamatan yang dapat menampung aspirasi, gagasan, serta solusi dari masyarakat secara langsung.

Lebih lanjut, penggabungan antara sektor publik, swasta, dan masyarakat dalam pengelolaan pendidikan dasar di Sidoarjo mencerminkan pergeseran paradigma dari pemerintah menuju tata kelola, di mana peran pemerintah tidak lagi utama sebagai pelaksana tunggal, tetapi sebagai fasilitator dan pendorong untuk kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak. Pendekatan ini sesuai dengan konsep *co-production of public services* yang menyoroti peran aktif masyarakat dalam merancang, melaksanakan, dan menilai kebijakan publik, termasuk dalam sektor pendidikan. Dengan partisipasi berbagai pihak yang berkepentingan, hasil kebijakan menjadi lebih relevan, fleksibel, dan memiliki legitimasi sosial yang solid. Dalam konteks pendidikan di Kabupaten Sidoarjo, kerjasama antar sektor ini telah memberikan sumbangan terhadap peningkatan indeks kualitas pendidikan, peningkatan jumlah partisipasi sekolah, dan penguatan kapasitas pengajar melalui program kemitraan strategis. Sehingga, pengelolaan kolaboratif yang tertata dan fokus pada hasil harus terus ditingkatkan sebagai model inovasi untuk memperkuat keberlanjutan sistem pendidikan lokal yang sensitif terhadap tantangan zaman dan kebutuhan warga.

5. KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo telah mengalami kemajuan signifikan dalam memperkuat kebijakan dan layanan publik pendidikan melalui penerapan inovasi digital, peningkatan partisipasi masyarakat, perbaikan kinerja pegawai, serta kolaborasi antar sektor dengan berbagai pihak berkepentingan. Pelaksanaan program seperti *Sidoarjo Education Service Center* (SESC), e-Supervisi, dan e-Kinerja Pendidikan merupakan bukti nyata transformasi birokrasi pendidikan menuju pengelolaan yang lebih transparan, efisien, dan partisipatif sesuai dengan prinsip *New Public Service* dan *Collaborative Governance*. Walaupun begitu, tantangan tetap ada dalam distribusi akses teknologi di kawasan terpencil, ketimpangan partisipasi masyarakat, serta kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas SDM di sektor pendidikan. Dengan demikian, saran utama dari penelitian ini adalah perlunya penguatan strategi tata kelola pendidikan yang berbasis kolaborasi digital secara lebih merata dan berkelanjutan, peningkatan literasi kebijakan di tingkat sekolah dan masyarakat, serta pembentukan mekanisme evaluasi terintegrasi di antara para pelaku pendidikan di Sidoarjo. Dengan langkah itu, kebijakan pendidikan daerah tidak hanya fokus pada efisiensi administratif, tetapi juga dapat menciptakan layanan publik pendidikan yang inklusif, adaptif, dan adil sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*Good Governance*) di era modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2007). *Collaborative Governance* in Theory and Practice Downloaded from. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). *Collaborative Governance* in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/JOPART/MUM032>
- Castañer, X., & Oliveira, N. (2020). Collaboration, Coordination, and Cooperation Among Organizations: Establishing the Distinctive Meanings of These Terms Through a Systematic Literature Review. *Journal of Management*, 46(6), 965–1001. https://doi.org/10.1177/0149206320901565/ASSET/IMAGES/LARGE/10.1177_0149206320901565-FIG2.JPEG
- Denhart and denhart. (2007). *The New Public Service. Expanded adition. Serving not stering*. ME. Sharpe Inc.
- Dunn, W. N. (2018). The Process of Policy Analysis. In *Public Policy Analysis*. <https://doi.org/10.4324/9781315181226-1>
- Dwiyanto, A. (2021). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia* . UGM Press.

- Febriadi, H. (2022). Kualitas Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Pemilu Langsung di Indonesia. *Al Iidara Balad*, 4(2), 34–41. <https://doi.org/10.36658/ALIIDARABALAD.4.2.47>
- Fika, N., Fauzi, A., & Qurtubi, A. (2023). Analisis Kebijakan Versi William Dunn dalam Pondok Pesantren Modern. *Journal on Education*, 05(04).
- Fitriani, F., Pramesti, W., & Anuraga, G. (2024). Pengukuran Kualitas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo pada Jenjang SMP dengan Structural Equation Modeling. *UJMC (Unisda Journal of Mathematics and Computer Science)*, 10(1), 18–25. <https://doi.org/10.52166/UJMC.V10I1.6624>
- Hay, A. (2025). What may be: policy enactment in education, a new conceptual framework with actor-network theory. *Journal of Education Policy*, 40(2), 179–198. <https://doi.org/10.1080/02680939.2024.2411989;PAGE:STRING:ARTICLE/CHAPTER>
- Mahardhani, A. J. (2023). The Role of Public Policy in Fostering Technological Innovation and Sustainability. *Journal of Contemporary Administration and Management (ADMAN)*, 1(2), 47–53. <https://doi.org/10.61100/ADMAN.V1I2.22>
- Mahardhani, A. J., Darmawan, D. A., Sunarto, S., & Mufanti, R. (2025). Zero Stunting Villages: Analyzing the Challenges and Imperatives of Actor Collaboration. *Jurnal Public Policy*, 11(2), 133–140. <https://doi.org/10.35308/JPP.V11I2.11024>
- Mubarok, S., Zauhar, S., Setyowati, E., & Suryadi, S. (2020). Policy Implementation Analysis: Exploration of George Edward III, Marilee S Grindle, and Mazmanian and Sabatier Theories in the Policy Analysis Triangle Framework. *Journal of Public Administration Studies*, 005(01). <https://doi.org/10.21776/ub.jpas.2020.005.01.7>
- Pahleviannur, M. R., Grave, A. D., Saputra, D. N., Mardianto, D., & Mahardhani, A. J. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Pradina Pustaka.
- Prasetya, N., Putri, R., & Nuroh, E. Z. (2025). Analisis Gerakan Literasi Sekolah untuk Meningkatkan Minat Baca Peserta Didik di Sekolah Dasar. *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa, Dan Sastra*, 11(2), 2328–2340. <https://doi.org/10.30605/ONOMA.V11I2.5798>
- Putu, N., Widanti, T., Mahardhani, A. J., Willim, A. P., Safri, H., Asnora, F. H., & Amin, F. (2023). Social Transformation in Higher Education: Basic Foundations in Social Development. *Resmilitaris*, 13(2), 3777–3787. <https://resmilitaris.net/menu-script/index.php/resmilitaris/article/view/2915>
- Suyuthi, A., Mumtahanah, N., & Wahyudi, W. E. (2023). Collaborative-Participatory Model in Education Policy during a Pandemic: Building Collaboration to Bridge the Gap. *Al-Hayat: Journal of Islamic Education*, 7(2), 559. <https://doi.org/10.35723/ajie.v7i2.401>
- Tobroni, Yunus Abu Bakar, M., Firmansyah, E., & Abdeljelil, M. Ben. (2024). Legal Framework Analysis of Islamic Religious Education Policy Implementation. *International Journal of Law and Society (IJLS)*, 3(3), 217–237. <https://doi.org/10.59683/IJLS.V3I3.143>
- Widiawati, S., Mahardhani, A. J., Cahyono, H., Sulton, S., & Nasution, I. F. (2023). Collaborative Governance in Fulfilling the Right to Education for Children of Non-Document Migrant Workers in Malaysia. *Journal of Governance*, 8(2). <https://doi.org/10.31506/JOG.V8I2.19207>